

LAMPIRAN 1

DAFTAR ARTIKEL OPINI KOMPAS SEBAGAI KORPUS PENELITIAN

Berikut adalah daftar 20 artikel opini Kompas bertema "Indonesia Gelap" yang dijadikan korpus analisis. Artikel dipublikasikan pada periode Juli 2023 hingga Oktober 2025 sebagai data utama dan diakses melalui arsip digital Kompas.id.

Inventaris Artikel Kompas berdasarkan Klasifikasi Data

A. Data Utama

Tabel Lampiran 1 Inventaris Artikel Kompas Data Utama

No.	Judul Artikel	Tanggal Terbit	Klasifikasi
6	Menanti Dialog Prabowo dengan "Indonesia Gelap"	21/04/2025	Data utama
7	Prabowo Vs Indonesia Gelap: Segepok Tanya	24/07/2025	Data utama
11	80 Tahun Merdeka: Indonesia Maju?	15/08/2025	Data utama
12	Ketimpangan dan Sumbu Pendek Bangsa	03/09/2025	Data utama
13	Mendengar Suara Rakyat...	18/10/2025	Data utama
18	Kebijakan Populisme dan Komunikasi Politik	[tidak tercantum]	Data utama
19	Indonesia Gelap, Terang atau "Tintrim"	[tidak tercantum]	Data utama
20	Alasan Pindah Kewarganegaraan: Dari Politik, Rasisme, hingga Ekonomi	22/07/2023	Data utama bersyarat

B. Data Kontekstual

Tabel Lampiran 2 Inventaris Artikel Kompas Data Kontekstual

No.	Judul Artikel	Tanggal Terbit	Klasifikasi
1	Rangkuman Mahasiswa Demo Indonesia Gelap, Ini Maksud dan Tuntutannya	18/02/2025	Data kontekstual
2	Berjam-jam Demo Indonesia Gelap di Jakarta, Diwarnai Kericuhan dan 13 Tuntutan kepada Pemerintah	18/02/2025	Data kontekstual
3	Ini 13 Tuntutan Massa Aksi Indonesia Gelap untuk Pemerintah	17/02/2025	Data kontekstual
4	Sampai Kapan Tagar Indonesia Gelap Bertahan dan Apa Sebenarnya Tuntutannya?	20/02/2025	Data kontekstual
5	Demo Indonesia Gelap Hari Ini, 2.500 Mahasiswa Akan “ <i>Long March</i> ” dari TIM ke Patung Kuda	21/02/2025	Data kontekstual
8	Saat Prabowo Sebut Indonesia Gelap Didanai Koruptor, Apakah Benar?	21/07/2025	Data kontekstual
9	CEK FAKTA: Tidak Ada Bukti Aksi Indonesia Gelap Didanai Koruptor	Juli 2025	Data kontekstual
10	Puan Sebut Deretan Kritik Kreatif: Indonesia Gelap hingga One Piece	15/08/2025	Data kontekstual
14	Dari Kontroversi ke Kepercayaan: Kebijakan Fiskal Purbaya Ubah Sentimen Warganet	19/10/2025	Data kontekstual

15	Kritik Purbaya dan Jawaban Dedi Mulyadi soal Dana APBD Jabar Rp 4,1 Triliun	21/10/2025	Data kontekstual
16	Duduk Perkara Pernyataan Kontroversi Menteri Maman soal Barang KW	22/10/2025	Data kontekstual
17	Aspirasi Serikat Buruh ke DPR: Larangan Tahan Ijazah, Rasio Upah hingga Pesangon PKWT	01/10/2025	Data kontekstual

LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara berikut digunakan sebagai panduan dalam pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*). Pertanyaan bersifat semi-terstruktur dan dapat berkembang sesuai konteks wawancara.

Narasumber 1: Syifaul Arifin (Redaktur Solopos)

Latar Belakang: Praktisi jurnalistik; diwawancarai terkait praktik produksi wacana dan posisi media.

1. Menurut Bapak, sejauh mana media seperti Solopos bisa bersikap kritis tanpa dianggap berpihak?
2. Bagaimana strategi redaksi dalam menegosiasikan kepentingan antara independensi jurnanisme dengan tekanan-tekanan eksternal yang mungkin muncul setelah sebuah opini yang sangat berani diterbitkan?
3. Dalam pengalaman Bapak, apakah tulisan opini sering disalahpahami oleh publik karena pilihan bahasanya?
4. Menurut Bapak, apa indikator yang paling nyata bahwa sebuah media benar-benar telah menjalankan fungsinya sebagai penyambung lidah masyarakat yang aspirasinya seringkali tidak tersampaikan ke pusat kekuasaan?
5. Menurut Bapak, seberapa besar pengaruh pilihan kata seperti “gelap” dalam membentuk persepsi pembaca?

Narasumber 2: Ika Yuniati (Ketua AJI Surakarta)

Latar Belakang: Ketua organisasi profesi jurnalistik; diwawancarai terkait independensi media dan literasi kritis.

1. Bagaimana pandangan Anda terhadap narasi “Indonesia Gelap”? Apakah ini potret nyata kesenjangan aspirasi atau sekadar konstruksi bahasa media?
2. Apakah Anda melihat ada jarak bahasa antara teks media yang intelektual dengan kemampuan literasi masyarakat umum? Bagaimana cara menjembatannya?

3. Menurut Anda, apakah model literasi kritis sebaiknya berfokus pada cara mendeteksi keberpihakan media, atau pada cara siswa memproduksi narasi tandingan?
4. Bagaimana cara menyederhanakan konsep relasi kuasa dalam teks berita agar lebih mudah dipahami generasi muda tanpa menghilangkan esensi kritisnya?
5. Bagaimana peran organisasi seperti AJI dalam mendukung transformasi pendidikan literasi media?

Narasumber 3: Anto Broto Waloyo (Pembaca Kompas)

Latar Belakang: Pembaca Kompas; diwawancarai terkait resepsi dan konsumsi teks wacana “Indonesia Gelap”.

1. Anda menangkap judul “gelap”-nya itu lebay atau gimana? Kritik atau lebay?
2. Cara Kompas nulis opini itu terasa memihak ke salah satu pihak atau netral ya pak?
3. Kalau Kompas dan media lain nulis hal yang berbeda soal isu yang sama, Anda lebih percaya yang mana dan kenapa?
4. Menurut Anda, Kompas nulis opininya itu untuk kepentingan siapa? Masyarakat atau pemerintah?
5. Artikel opini di Kompas itu terasa seperti suara siapa? Rakyat, akademisi, atau elit?
6. Pandangan Bapak pas baca beritanya itu gimana?
7. Kalau Kompas itu menurut Bapak memihak ke pemerintah, masyarakat, atau netral?
8. Kalau Bapak sendiri menggambarkan Indonesia sekarang dalam satu kalimat, apa sebutannya?
9. Kesan Bapak pas baca Kompas itu gimana?
10. Bapak biasanya lihat berita Kompas itu di mana? TV atau media lain?

LAMPIRAN 3

TRANSKRIP WAWANCARA

Berikut adalah transkrip wawancara dengan ketiga narasumber. Transkrip disajikan dalam bentuk verbatim dengan penyesuaian seperlunya untuk keterbacaan.

Narasumber 1: Syifaul Arifin

Jabatan/Status : Redaktur Solopos

Tempat Wawancara : Solopos

Tanggal : 30 April, 2026

Pewawancara : Rayhania Habibah

Keterangan: P = Pewawancara | N = Narasumber

P: Menurut Bapak, sejauh mana media seperti Solopos bisa bersikap kritis tanpa dianggap berpihak?

N: *Sejak awal memang media itu tidak boleh memihak harus independen, istilahnya ya. Tidak pro kanan atau kiri. Sebenarnya gini, ada perbedaan yang harus kita bedakan sebelum bicara soal itu. Kalau netral, itu tidak berpihak sama sekali pakai kacamata kuda, tengah-tengah, tidak perlu kanan atau kiri. Kalau independen, itu boleh berpihak. Nah, media dalam hal ini lebih cenderung ke independen. Artinya boleh berpihak, tetapi keberpihakannya itu bukan karena tekanan atau pengaruh dari pihak luar, tapi memang dia sendiri yang menentukan.*

P: Jadi lebih ke netral gitu ya?

N: *Enggak, malah lebih ke independen. Kalau netral itu pakai kacamata kuda tengah-tengah, tidak akan perlu kanan atau kiri, A atau B. Tapi kalau independen, itu boleh berpihak. Misalnya gini, ada orang yang menjadi korban kesewenang-wenangan polisi kita berada pada posisi bersikap independen, jadi berpihak. Tapi dia berpihak itu bukan karena kepentingan tertentu atau karena tekanan, tapi karena merasa bahwa dia harus berpihak karena nuraninya seperti itu berpihak kepada orang yang tidak memiliki kekuatan. Itu yang disebut independen, beda sama netral. Dalam hal ini media lebih condong ke independen.*

P: Bagaimana strategi redaksi dalam menegosiasikan kepentingan antara

independensi jurnanisme dengan tekanan-tekanan eksternal yang mungkin muncul setelah sebuah opini yang sangat berani diterbitkan?

N: *Strateginya adalah kita bekerja dengan kode etik jurnalistik ada yang boleh dan ada yang tidak boleh dilakukan. Kalau misalnya kita sudah secara independen bersikap, maka itu adalah pilihan bahwa itulah yang bisa dilakukan oleh media. Sebagai contoh, dalam isu tertentu kita melakukan advokasi melalui tulisan bersikap seperti itu, mengarah pada pembelaan, agar kasus itu diselesaikan secara tuntas. Itu adalah sikap, dan bisa jadi itu berpihak berpihak pada korban. Tapi kita pakai strategi bahwa keberpihakan kita itu masih dalam batas yang ditoleransi oleh kode etik jurnalistik.*

P: Dalam pengalaman Bapak, apakah tulisan opini sering disalahpahami oleh publik karena pilihan bahasanya?

N: *Sebenarnya tidak terlalu banyak ya, karena bahasa yang dipakai oleh media itu adalah bahasa yang sederhana. Dan yang disampaikan oleh media itu adalah cerminan dari apa yang terjadi di masyarakat. Jadi ada istilah, media itu cerminan dari masyarakat apa yang disampaikan masyarakat, ya berarti itu yang disampaikan oleh media. Yang disampaikan media tidak jauh-jauh berbeda dengan apa yang ada di masyarakat.*

P: Menurut Bapak, apa indikator yang paling nyata bahwa sebuah media benar-benar telah menjalankan fungsinya sebagai penyambung lidah masyarakat yang aspirasinya seringkali tidak tersampaikan ke pusat kekuasaan?

N: *Media itu adalah voice of the voiceless dia menyuarakan aspirasi dari kelompok yang tidak bisa bersuara. Karena mereka tenggelam sebagai kelompok rentan, minoritas, dan sebagainya, maka media menjadi penyambung lidah mereka, mengupayakan advokasi kepentingan mereka. Nah, itulah yang dilakukan oleh media menyampaikan kepentingan-kepentingan masyarakat, termasuk kepentingan kelompok yang tidak bisa bersuara, agar bisa bersuara. Itu yang dilakukan, termasuk menyampaikannya kepada pemerintah, kepada negara, dan sebagainya. Itu bagian dari advokasi yang dilakukan oleh media.*

P: Menurut Bapak, seberapa besar pengaruh pilihan kata seperti “gelap” dalam membentuk persepsi pembaca?

N: *Jadi misalnya “Indonesia gelap” atau sejenisnya itu kan yang berkembang di media sosial dan di masyarakat. Media massa itu hanya mengamplifikasi apa yang terjadi di masyarakat menyampaikan apa yang ada. Kita tidak menambah-nambahi, tidak memanasi-manasi, tapi*

memberitakan bahwa ternyata ada keresahan seperti ini. Keresahan dari masyarakat bahwa Indonesia dalam keadaan gelap. Jadi istilah itu adalah istilah sosiologis yang memang hidup dan berkembang di masyarakat.

Narasumber 2: Ika Yuniati

Jabatan/Status: Ketua AJI Surakarta

Tempat Wawancara: Kantin Solopos

Tanggal: 4 Mei, 2026

Pewawancara: Rayhanah Habibah

Keterangan: P = Pewawancara | N = Narasumber

P: Bagaimana pandangan Anda terhadap narasi “Indonesia Gelap”? Apakah ini potret nyata kesenjangan aspirasi atau sekadar konstruksi bahasa media?

N: *Indonesia Gelap memang bukan sekadar bahasa media, tapi itu bagian dari aspirasi masyarakat. Apapun yang ada di medsos harus kita kritisi. Ketika ada sesuatu yang FYP dan banyak dibicarakan, banyak yang bikin konten ikut-ikutan trending. Sampai banyak banget kalau di Twitter misalnya ada trending, 5 besar bisa saja diisi narasi yang pro-pemerintah, baru di bawahnya muncul narasi kritis. Tapi faktanya yang kita dapatkan di lapangan di Solo aja misalnya soal Makan Bergizi Gratis (MBG), banyak yang berdampak negatif: potensi korupsi besar, memakan anggaran, bahan makanan Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dikonsumsi anak-anak karena tidak memenuhi kebutuhan mereka. Artinya ada atau tidaknya Makan Bergizi Gratis (MBG) itu tidak berdampak besar bagi anak-anak. Dari situ, narasi Makan Bergizi Gratis (MBG) baik vs fakta Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak baik media melihat ini sebagai kontradiksi. Bisa jadi ini orang yang salah persepsi, atau memang dibuat untuk menaikkan citra. Media harus kritis dan skeptis. Berbeda dengan Indonesia Gelap. Indonesia Gelap juga FYP di Instagram, Twitter, TikTok meskipun di TikTok banyak yang seolah pro-pemerintah. Tapi kita bisa melihat banyak poin yang mendukung bahwa Indonesia saat itu memang sedang tidak baik-baik saja, memang gelap. Jadi apakah ini hanya bahasa media? Iya, bahasa media. Tapi juga sekaligus kesenjangan aspirasi bahasa media hanya menangkap apa yang ada di masyarakat. Namun harus disertai sikap skeptis, karena kita diberi privilege besar untuk menuliskan apapun, dan privilege itu harus digunakan dengan baik.*

Beda dengan influencer yang hanya menangkap tren untuk menaikkan engagement. Kalau ternyata waktu itu Indonesia sedang baik-baik saja, narasi kita pun akan berbeda kita tulis faktanya. Jadi bukan sekadar framing. Kita melihat fenomena di masyarakat dan menanggapi dengan sikap kritis dan skeptis.

P: Apakah Anda melihat ada jarak bahasa antara teks media yang intelektual dengan kemampuan literasi masyarakat umum? Bagaimana cara menjembatannya?

N: *Idealnya tidak ada jarak. Salah satu fungsi media adalah edukasi selain informasi dan hiburan. Dari dasar fungsi itu, tulisan-tulisan yang ada harus informatif dan komunikatif. Penulisan karya jurnalistik basisnya adalah EYD dan KBBI. Tidak boleh memasukkan bahasa asing atau istilah yang tidak lazim di masyarakat. Kalau ada istilah baru, selalu diberi penjelasan dalam kurung misalnya backlog ditulis sebagai “backlog (kekurangan hunian bagi sebuah keluarga).” Karena tulisan kita juga dibaca oleh masyarakat umum yang mungkin tidak familiar dengan istilah teknis. Kalau ada media yang tulisannya malah bikin masyarakat bingung, berarti dia gagal menjalankan fungsinya. Karya yang baik adalah karya yang dibaca. Ide liputan sebagus apapun tidak ada artinya kalau tidak bisa dipahami pembacanya.*

P: Menurut Anda, apakah model literasi kritis sebaiknya berfokus pada cara mendeteksi keberpihakan media, atau pada cara siswa memproduksi narasi tandingan?

N: *Tergantung tujuannya. Kalau fokusnya pada isu jurnalistik, lebih ke perspektif media karena di masa sekarang perspektif media bisa memengaruhi banyak hal: kepentingan media itu sendiri dan tekanan dari luar. Kalau fokusnya pada wacana di masyarakat, mungkin lebih ke bagaimana meng-counter isu. Tapi bukan siswa yang jadi subjeknya siswa tidak punya kapasitas sekuat itu. Yang lebih relevan adalah publik secara umum, atau influencer dan aktivis yang bisa memproduksi wacana-wacana kritis lebih banyak untuk menandingi isu-isu receh. Karena menekan orang agar tidak membuat isu receh itu sulit kita tidak tahu kepentingan dan kekuatannya. Yang bisa dilakukan adalah terus memproduksi konten kritis yang lebih banyak agar isu penting tidak tenggelam. Jadi kalau concern-mu pada kekuatan publik untuk meng-counter isu, subjeknya sebaiknya bukan siswa terlalu kecil. Tapi kalau concern-mu pada bagaimana posisi media melihat isu-isu di luar, itu jalur yang lain. Keduanya sama-sama penting, tergantung fokus penelitianmu.*

P: Bagaimana cara menyederhanakan konsep relasi kuasa dalam teks berita agar lebih mudah dipahami generasi muda tanpa menghilangkan esensi kritisnya?

N: *Kalau dalam konteks jurnalis, caranya sama seperti tadi hilangkan bahasa-bahasa teknis yang hanya dikenal profesi tertentu. Pakai bahasa yang komunikatif. Kalau untuk siswa, lebih efektif pakai simulasi atau alat peraga. Saya pernah mengajar mahasiswa soal kekerasan seksual di pondok pesantren saya pakai simulasi “pohon kehidupan.” Di pucuk pohon adalah kasus kekerasan seksual, tapi di akarnya adalah relasi kuasa: ketundukan pada figur otoritas agama, rasa takut, dan sebagainya. Mahasiswa disuruh menyusun sendiri penyebab-penyebabnya ada yang menulis “bajunya seksi,” ada yang menulis “pengajarnya laki-laki,” tapi pada akhirnya yang paling berpengaruh tetap relasi kuasa. Dengan simulasi seperti itu mereka lebih paham. Karena kalau langsung bahas konsep relasi kuasa secara abstrak, bahkan saya sendiri waktu SMA tidak mengerti. Terlalu tinggi. Jadi simulasi adalah cara paling efektif untuk konteks siswa.*

P: Bagaimana peran organisasi seperti AJI dalam mendukung transformasi pendidikan literasi media?

N: *Sangat penting. Kalau saya hanya bekerja sebagai jurnalis di Solopos menulis berita dan selesai tidak ada ruang untuk membuat kelas jurnalistik bagi anak-anak, karena fungsi perusahaan media adalah memproduksi konten, bukan mengajar. Tapi di organisasi profesi seperti AJI, kita bisa mengembangkan isu apapun termasuk memberikan edukasi kepada anak-anak dan remaja. AJI sering diundang ke sekolah maupun kampus untuk mengisi diskusi dan pengembangan literasi media. Pengembangan seperti itu sangat sulit didapat di kantor, karena kepentingan di kantor adalah kepentingan pekerjaan. Di organisasi profesi itulah ruang pengembangan diri yang paling besar makanya di manapun kita selalu disarankan untuk berorganisasi.*

Narasumber 3: Anto Broto Waloyo

Jabatan/Status: Pembaca Kompas

Tempat Wawancara: Rumah

Tanggal : 29 April, 2026

Pewawancara: Rayhanah Habibah

Keterangan: P = Pewawancara | N = Narasumber

P: Anda nangkap judul “gelap”-nya itu lebay atau gimana? Kritik atau lebay?

N: Menurut saya kata “gelap”-nya itu nyambung sih, karena memang banyak banget hal-hal yang terjadi di Indonesia yang makin memperburuk negara. Contohnya kayak meningkatnya jumlah pengangguran, terus orang-orang mengharapkan 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan wapres apakah itu terealisasi atau tidak.

P: Cara Kompas nulis opini itu terasa memihak ke salah satu pihak atau netral?

N: Netral.

P: Kalau Kompas dan media lain nulis hal yang berbeda soal isu yang sama, Anda lebih percaya yang mana dan kenapa?

N: Saya belum baca dari media lainnya untuk sekarang. Karena saya bacanya Kompas, saya lebih melihat ke sudut pandang Kompas.

P: Menurut Anda, Kompas nulis opininya itu untuk kepentingan siapa? Masyarakat atau pemerintah?

N: Menurutku untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah seluruh masyarakat Indonesia. Karena kita memang perlu tahu tentang isu-isu yang sekarang beredar. Sebagian masyarakat dan pemerintah juga harus tahu. Jadi tidak hanya masyarakat yang peduli terhadap pemerintah, tapi pemerintah juga harus peduli karena itu kewajibannya.

P: Artikel opini di Kompas itu terasa seperti suara siapa? Rakyat, akademisi, atau elit?

N: Akademisi.

P: Pandangan Bapak pas baca beritanya itu gimana?

N: Melihat kondisi saat ini dari kemarin, saat ini, ke depannya pun juga terasa aneh. Seolah-olah tidak ada harapan untuk Indonesia ke depannya.

P: Kalau Kompas itu menurut Bapak memihak ke pemerintah, masyarakat, atau netral?

N: Kompas itu seharusnya netral, independen. Tapi saya sendiri jarang membaca Kompas, jadi kurang tahu condong ke mana. Seharusnya independen, tidak ke mana-mana. Kelihatannya begitu. Yang jelas, dari cita-cita kemerdekaan dulu sampai sekarang, Indonesia itu salah

mengelola. Kalau yang mengelola itu benar-benar pintar, rakyat Indonesia tidak ada yang miskin bahkan tidak perlu bayar pajak. Di negara lain yang pemimpinnya cerdas dan memperhatikan rakyatnya, hidupnya sudah makmur. Kalau Indonesia sekarang ya seperti ini. Pemerintah maunya rakyat terus dikejar-kejar pajak ini, pajak itu bahkan mau dinaikkan lagi.

P: Kalau Bapak sendiri menggambarkan Indonesia sekarang dalam satu kalimat, apa sebutannya?

N: *Ya kalau disebut Indonesia gelap, memang gelap. Saat itu memang gelap besok-besoknya pun siapa saja bisa melihat sendiri. Indonesia suram, Indonesia gelap itu tidak bisa dibayangkan oleh anak cucu kita. Apalagi generasi sekarang yang sudah tenggelam dengan gadget, konten-konten yang tidak ada habisnya.*

P: Kesan Bapak pas baca Kompas itu gimana?

N: *Kesan pertama saya rasa Kompas banyak menyampaikan hal yang benar. Tempo yang lalu juga ada yang protes, kalau tidak salah. Jadi Kompas kelibatangnya juga menyampaikan dengan benar.*

P: Bapak biasanya lihat berita Kompas itu di mana? TV atau media lain?

N: *Di internet. Di medsos Kompas itu ada di media sosialnya.*

LAMPIRAN 4

DOKUMENTASI WAWANCARA

Berikut adalah dokumentasi foto kegiatan wawancara dengan narasumber penelitian.

Gambar 4.1 Wawancara dengan Syifaul Arifin (Redaktur Solopos)



Gambar 1. Peneliti sedang melakukan wawancara dengan Syifaul Arifin, M.I.Kom selaku Redaktur Solopos. Wawancara dilaksanakan di kantor Solopos pada tanggal 30 April 2026 untuk menggali pandangan narasumber mengenai praktik jurnalisme, independensi media, dan konstruksi wacana “Indonesia Gelap” dalam pemberitaan media arus utama.

Gambar 4.2 Wawancara dengan Ika Yuniati (Ketua AJI Surakarta)



Gambar 2. Peneliti sedang melakukan wawancara dengan Ika Yuniati selaku Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surakarta. Wawancara dilaksanakan di kantin Solopos pada tanggal 4 Mei 2026. Dalam sesi ini, narasumber memberikan pandangannya mengenai narasi “Indonesia Gelap” sebagai fenomena sosial, peran organisasi profesi jurnalistik dalam mendukung literasi media, serta strategi efektif untuk memperkenalkan konsep relasi kuasa kepada generasi muda.

Wawancara dengan Anto Broto Waloyo (Pembaca Kompas)



Gambar 3. Peneliti sedang melakukan wawancara dengan Anto Broto Waloyo selaku pembaca Kompas. Wawancara dilaksanakan di kediaman narasumber pada tanggal 29 April 2026. Narasumber menyampaikan pandangannya sebagai pembaca awam mengenai istilah “Indonesia Gelap”, sikap Kompas dalam pemberitaan, serta kesannya sebagai konsumen media terhadap kondisi Indonesia saat ini.